



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
JEPARA



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

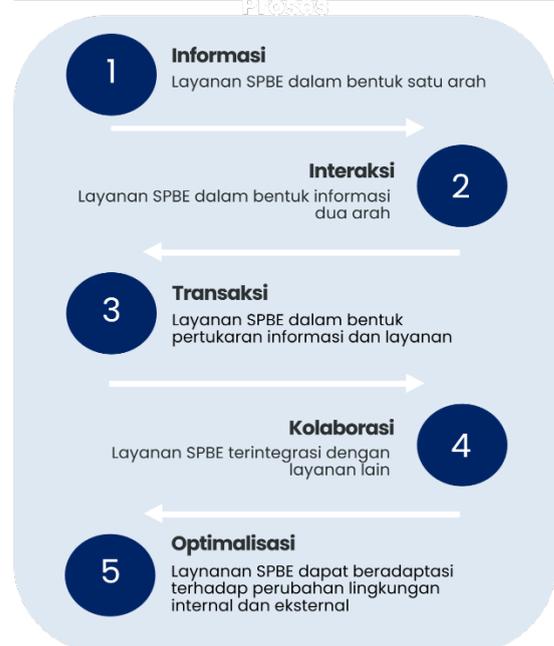
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

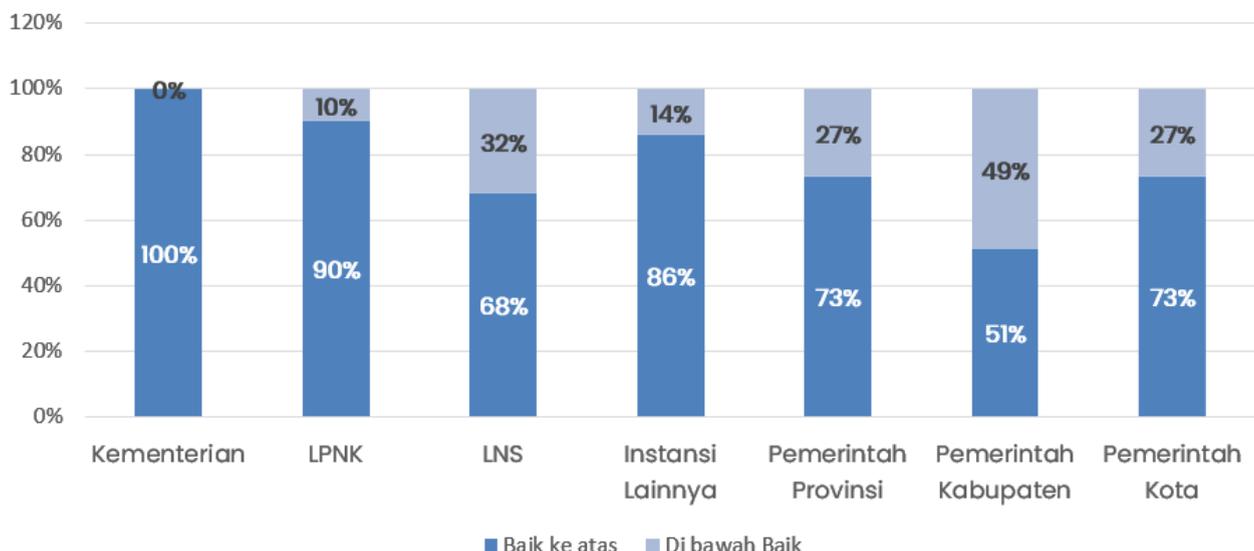


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

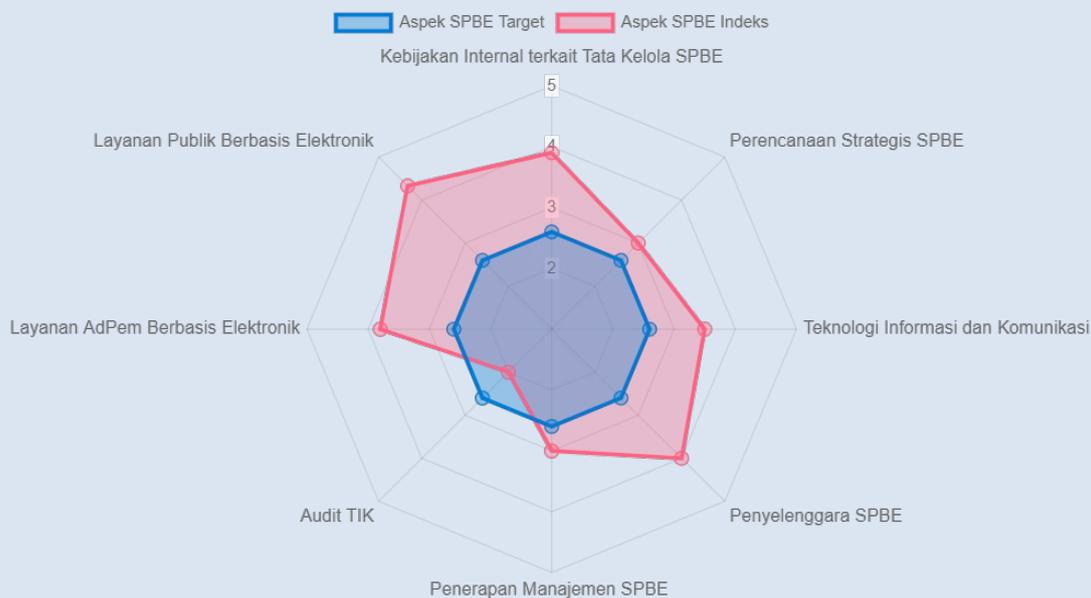
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,63
Domain Kebijakan SPBE	3,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,90
Domain Tata Kelola SPBE	3,40
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	4,00
Domain Manajemen SPBE	2,73
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	3,00
<i>Audit TIK</i>	2,00
Domain Layanan SPBE	4,01
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah semua terpenuhi oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara dengan memiliki arah kebijakan internal tata kelola SPBE yang mengatur 10 indikator tata kelola sebagai sumber hukum pengelolaan SPBE.

- **Kekuatan**
Semua indikator Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola pada tahun 2023 ini telah diatur melalui Peraturan Bupati Jepara No.62 Tahun 2020 dan sudah melakukan reviu sebagai dasar hukum pengaturan penerapan indikator Internal Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah ,Manajemen Keamanan Informasi ,Internal Audit TIK, Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kebijakan internal terkait tata kelola SPBE masih dapat ditingkatkan levelnya menjadi yang lebih atas jika dilakukan proses reviu dan perbaikan dari perundangan yang sudah ada.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara prinsip, penerapan pada Aspek perencanaan strategis SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara Rencana anggaran SPBE sudah terpetakan dengan baik.

- **Kekuatan**
Tidak ada kekuatan yang menonjol kabupaten Jepara tetapi sudah memenuhi aspek .
- **Kelemahan**
Demikian juga dengan kelemahan, tidak ada indikator yang masuk menjadi faktor kelemahan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi Komunikasi SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara adalah Indikator 17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Indikator 18 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**
Indikator 15 Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE dan Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jepara sudah melalui proses reviu dan evaluasi.
- **Kelemahan**
Demikian juga dengan kelemahan, tidak ada indikator yang masuk menjadi faktor kelemahan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek penyelenggara SPBE yaitu indikator kolaborasi penerapan SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

- **Kekuatan**
Level kematangan . Indikator 19 Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah Daerah, dan indikator 20 Kolaborasi Penerapan SPBE telah sampai pada reviu dan evaluasi. Jika ingin mencapai level kematangan yang lebih baik perlu menindaklanjuti reviu dan evaluasi yang sudah dilakukan
- **Kelemahan**
Pemerintah Kabupaten Jepara sudah melakukan aspek ini dengan baik, tidak ada kelemahan di aspek ini.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Jepara dengan baik pada : indikator 21 Penerapan Manajemen Risiko SPBE, indikator 22 Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, indikator 24 Penerapan Manajemen Aset TIK, dan indikator 25 yaitu Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia

- **Kekuatan**
Pada Indikator 23 Penerapan Manajemen Data, dan Indikator 26 Penerapan Manajemen Pengetahuan terlihat aspek penerapan manajemen SPBE yang menjadi unggulan dari pemerintah kabupaten Jepara. Telah sampai pada reviu dan evaluasi.

- Kelemahan
Pada dua indikator: indikator 27 Penerapan Manajemen Perubahan, dan indikator 28 Penerapan Manajemen Layanan SPBE banyak kekurangan dalam penyusunan dokumentasi.

F. Audit TIK

Secara prinsip, penerapan pada Aspek Audit TIK pada pemerintahan daerah kabupaten Jepara masih belum sesuai pemenuhan evaluasi permenpanRB 59/2020.

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK ini belum terlihat yang menjadi unggulan dari pemerintah kabupaten Jepara.
- Kelemahan
Aspek Audit TIK walaupun sudah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan aturan ketentuan yang dipersyaratkan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara indikator Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (LPSE) dan indikator Layanan Pengawasan Internal Pemerintah.

- Kekuatan
Aspek Layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik . Menjadi bukti kuat telah dilaksanakannya aspek ini dengan dengan cara terbaik dan bersungguh-sungguh dengan kategori unggul yaitu indikator : Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, dan Layanan Kearsipan Dinamis telah dilakukan reuiu.
- Kelemahan
Untuk tahun 2023, tidak ada kelemahan yang signifikan. Aspek Layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik mempunyai nilai yang terbaik yaitu unggul.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan Aspek layanan publik pada pemerintahan Kabupaten Jepara telah dipenuhi oleh semua indikator dalam aspek layanan publik ini.

- Kekuatan
Pada Aspek layanan publik ini semua indikator 42 sampai 47 terlihat adanya layanan yang sudah di reuiu.
- Kelemahan
sudah melakukan hal yang terbaik. Tidak ada kelemahan pada pelaksanaan Aspek Layanan Publik berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi, penerapan manajemen, layanan administrasi sudah mendapatkan penilaian sangat baik. Secara terus menerus akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintahan Kabupaten Jepara .

Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintahan Kabupaten Jepara, sudah dapat menggambarkan predikat sangat baik. Dalam penerapan SPBE, terpenuhinya hampir semua aspek, dengan catatan aspek yang harus diperbaiki serius yaitu : Audit TIK.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara adalah pada penerapan Layanan SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dengan adanya Kebijakan yang unggul pada penerapan layanan SPBE diiringi dengan layanan administrasi pemerintahan yang terdokumentasi dengan baik dan pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang kepegawaian, perencanaan/penganggaran, dan kearsipan sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintahan Kabupaten Jepara menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	4
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4